

ABSTRAK

Perbatasan Kota Jayapura–Papua Nugini melalui PLBN Skouw memiliki peran strategis sebagai simpul utama konektivitas perdagangan dan interaksi sosial-ekonomi kedua negara. Namun, kelancaran arus barang di kawasan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur, ketidaksinkronan regulasi, hingga lemahnya integrasi kelembagaan CIQS. Tantangan tersebut diperburuk oleh keberadaan jalur tikus, kasus penyelundupan, serta dinamika operasional pasar lintas batas yang belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat arus barang, menentukan faktor yang paling berpengaruh, serta menganalisis sejauh mana kerja sama lintas batas Indonesia–Papua Nugini berperan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi data melalui wawancara mendalam terhadap tiga aktor kunci (PLBN Skouw, Badan Perbatasan Provinsi Papua, dan Badan Perbatasan Kota Jayapura), observasi lapangan, serta studi dokumen kebijakan, laporan operasional, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, penilaian faktor dominan menggunakan Expert Judgment dan Weighted Sum Model, serta evaluasi peran kerja sama lintas batas berdasarkan mekanisme CBM, JBC, BLM/BLM, dan praktik koordinasi CIQS. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur hambatan dan efektivitas kerja sama dalam konteks pengelolaan arus barang di PLBN Skouw–Wutung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama berasal dari ketidaksiapan infrastruktur logistik di sisi PNG, ketidaksinkronan regulasi dan prosedur CIQS bilateral, keterbatasan kapasitas digital pelaku ekspor-impor, serta rendahnya efektivitas koordinasi lintas lembaga yang berdampak pada lamanya proses dan meningkatnya aktivitas informal. Meskipun kerja sama lintas batas telah terbentuk melalui forum bilateral dan mekanisme CIQS, efektivitas implementasinya masih terbatas dan belum mampu mengatasi hambatan struktural. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, khususnya dalam penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur perbatasan, tata kelola lintas negara berbasis CBM, peningkatan sistem logistik, serta pengembangan wilayah perbatasan sebagai simpul ekonomi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Arus Barang, Infrastruktur, Kerjasama Lintas Batas, Perbatasan, Regulasi.*